

# **Konflik di DPP PKB**

## **(Studi Tentang Ada Tidaknya Dampak Konflik Di DPC PKB Kota Kediri)**

Luluk Rofiqotul Isyaroh\*

### **ABSTRAK**

*Konflik bisa terjadi dalam ruang lingkup budaya dan agama dalam Partai Politik, konflik merupakan bagian dari dinamika partai politik dan organisasi kemasyarakatan, suatu konflik dalam intern partai dapat berpengaruh terhadap sistem partai tersebut. Konflik PKB yang sangat berpengaruh terhadap tatanan struktur PKB sendiri adalah konflik antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar, keputusan ketua dewan syuro PKB yaitu Gus Dur untuk memberhentikan ketua Umum Dewan Tanfidz muhaimin Iskandar dianggap tidak bijaksana dan sepihak.*

*Adanya polemik konflik politik ditingkat pusat menimbulkan dampak kepengurusan di berbagai tingkatan dibawahnya. Peneliti memfokuskan dampak konflik yang terjadi di Kota Kediri (DPC PKB Kota Kediri). Terdapat dua kubu yang mengakui PKB yaitu kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin Iskandar, dalam perjalanannya akibat perpecahan di tingkat DPP kelompok Gus Dur melakukan pembekuan kepengurusan di DPC PKB Kota Kediri,*

Kata kunci : konflik, partai politik, PKB

### **ABSTRACT**

*Conflicts can occur within the scope of culture and religion in the political parties, conflict is a part of the dynamics of political parties and civil society organizations, an internal conflict within the party could affect the party system.*

*Conflict CLA greatly affect the order of the structure of PKB itself is a conflict between Gus Dur and Muhaimin Iskandar, chairman of the Syuro Council's decision that Gus Dur PKB to dismiss the chairman of the General Council Tanfidz Muhaimin Iskandar considered unwise and unilateral.*

*The existence of political conflict at the central polemic impact management at various levels below it. Researchers focused on the impact of the conflict in Kediri (DPC PKB Kediri). There are two camps that recognizes PKB faction stronghold Gus Dur and Muhaimin Iskandar, the way due at the DPP group split Gus Dur to freeze management in DPC PKB Kediri,*

Keywords: conflict, political parties, PKB

---

\* Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, email: lulukasror@yahoo.com

## PENDAHULUAN

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem politik demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara, bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, karena itu partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis. Banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik, yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan nafsu kekuasaannya sendiri. Partai politik hanya lah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu.

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikannya dalam hubungan "checks and balances", akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrim lah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Selama beberapa tahun terakhir ini dinamika perilaku para elit-elit partai politik memang sangat cukup menarik untuk dikaji, dikarenakan sering terjadi konflik internal pada masing-masing partai dan bahkan tidak jarang konflik antar partai yang melibatkan massa pun juga terjadi. Konflik dalam internal partai politik, dimulai dari konflik pimpinan tertinggi partai politik dengan elit pimpinan yang bersaing, sepertinya sudah menjadi tren yang dialami partai-partai politik

Saat ini, seperti gejala perpecahan internal kasus sebagai contoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pascakongres di Bali, juga fenomena politik internal Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) setelah silaturahmi nasional, serta deretan konflik internal yang terjadi ditubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara berulang.

Konflik merupakan bagian dari dinamika partai politik dan organisasi kemasyarakatan, karena perbedaan kepentingan dan persaingan untuk merebut kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi. Yang harus dilakukan ialah mengelola konflik supaya tidak memecah belah partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Persatuan dan kesatuan harus dijaga dan dipelihara dengan menjaga keseimbangan berbagai kepentingan yang ada dalam partai politik di semua tingkatan. Untuk bisa memelihara soliditas dan dinamika internal partai politik, maka harus ada kekuatan di luar partai yang dijadikan sparring partner (teman bertanding) atau lawan.

Kajian mengenai partai politik (parpol) merupakan salah aspek penting di dalam ilmu politik. Bila berbicara mengenai parpol, berarti akan membicarakan mengenai partisipasi rakyat dalam dua hal, yaitu pertama : partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara; kedua, partisipasi rakyat dalam membuat peraturan-peraturan perundang-undangan, oleh karena itu kajian mengenai parpol akan terkait dengan studi mengenai pemilihan umum (pemilu) dan konsep negara hukum.

Dampak konflik partai politik dalam perolehan suara di pemilu sangatlah berpengaruh, suatu partai yang sedang mengalami konflik intern partainya pasti akan lebih fokus kepada permasalahan yang terjadi di tubuh partai terlebih dahulu. Terlebih apabila konflik dalam partai itu menyangkut permasalahan peng'kubu'an di tubuh partai, fokus dan konsentrasi permasalahan akan terpecah menjadi masing masing kubu partai, masa atau kader juga akan terpecah, terjadi pengeblokan dan munculnya beberapa tokoh pencitraan dimasing masing kubu, hal ini mempengaruhi kepada perolehan suara dalam pemilu, belum lagi apabila kubu kubu tersebut membentuk partai yang mengatas namakan satu partai yang asli, akan terjadi kerancuan dan kebingungan di luar partai yang mengakibatkan menurunnya simpatisan masyarakat dan dengan begitu otomatis menurunnya citra dan perolehan suara dalam

pemilu.

Suatu konflik dalam intern partai juga dapat berpengaruh terhadap sistem partai tersebut, setiap partai politik dalam pembentukannya pastilah memiliki visi dan misi sebagai pedoman dan tolak ukur serta memiliki AD/ART sebagai landasan bergerak dan bersikap di dalam dan diluar lingkungan partai, dan didalam realisasinya membutuhkan para kader kader yang fokus memikirkan masa depan partai dan bukan terganggu dengan permasalahan di intern partai sendiri. Dengan adanya konflik di tubuh partai, peran dari pada visi dan misi menjadi tidak maksimal, partaipun akan menjadi partai yang berjalan tanpa visi dan misi kedepan, hal hal seperti diataslah yang mempengaruhi pemilihan suara suatu partai dalam pemilu, menurunnya pemilih karena terpecahnya suara tidak fokus kepada satu partai utuh.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dideklarasikan pada 23 Juli 1998, pendirinya adalah K.H. Abdurrahman Wahid, K.H. Mustofa Bisri dan K.H. Abdul Muqid Muzadi. Tujuan pendirian PKB adalah sebagai satu-satunya wadah berpolitik bagi anggota Nahdliyyin (sebutan bagi warga NU). Berpijak pada AD/ART basis ideologi PKB adalah Pancasila dan memiliki sifat sebagai partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan.

Sejalan dengan budaya di NU, kyai menduduki posisi dan peran yang sangat penting di PKB, secara struktural kyai ditempatkan pada posisi Dewan Syuro, lembaga perumus kebijakan tertinggi partai sekaligus pemegang otoritas moral untuk mengawasi pergerakan partai dalam upaya menggapai cita-cita politiknya. Dalam perjalanan politik selanjutnya, konflik demi konflik menerpa PKB sampai saat ini ada tiga konflik yang terjadi; pertama, Mathori Abdul Djali, kedua Alwi Shihab dan ketiga Muhaimin Iskandar. Setiap konflik berdampak pada keberadaan kyai, baik yang ada dalam struktur maupun di luar struktur partai, begitu pula kepada daerah (tingkat 1 dan 2).

Konflik politik di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhir-akhir ini tidak semata merepresentasikan konflik kepentingan politik di tubuh partai politik yang secara resmi diklaim berbasis massa Nahdlatul Ulama (NU)

ini, konflik tersebut sekaligus mengindikasikan kegagalan NU sebagai organisasi sosial keagamaan, NU tidak hanya menjadi korban, ataupun dikorbankan, demi ambisi politik tokoh-tokohnya sendiri.

Sebagaimana kekhawatiran sebagian tokoh NU sejak awal, keberadaan partai politik berbasis NU bukannya menjadi pendorong dinamika peran NU sebagai organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan sosial dan keagamaan, apalagi sebagai wahana meningkatkan prakarsanya untuk menyejahterakan umat Nahdliyyin (sebutan untuk warga NU) melainkan sebaliknya.

Konflik PKB yang sangat berpengaruh terhadap tatanan struktur PKB sendiri adalah konflik antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar, keputusan ketua dewan syuro PKB yaitu Gus Dur untuk memberhentikan ketua Umum Dewan Tanfidz muhaimin Iskandar dianggap tidak bijaksana dan sepihak, bahkan sikap otoriter Gus Dur sebagai ketua Dewan Syuro dianggap menjadi penyebab konflik internal PKB menjadi berkepanjangan.

#### **KAJIAN TEORITIK**

Konflik adalah gejala-gejala social yang selalu ada didalam setiap masyarakat. Selama masyarakat ada, selama itu pula konflik dan konsensus ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidaklah mungkin menghapuskan konflik seperti yang menjadi angan-angan para diktator, sebaliknya tidaklah mungkin konsensus dipertahankan terus menerus sekalipun dengan cara-cara kekerasan yang juga merupakan keinginan para penguasa otoriter. Meskipun konflik adalah gejala universal, konflik mempunyai dampak yang amat besar bagi masyarakat karena konflik yang berlangsung terus menerus akan menjurus kearah disintegrasi sosial. Oleh karena itu salah satu persoalan utama dalam masyarakat dan Negara adalah penyelesaian konflik yaitu usaha-usaha untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik sehingga konsensus tercapai.

Salah satu bentuk konflik sosial adalah konflik politik. Karena konflik politik adalah bagian dari konflik sosial. Konflik politik mempunyai keterkaitan dengan Negara/pemerintah, para pejabat politik/pemerintah, dan kebijakan. Selain itu sifat konflik politik yang selalu merupakan konflik kelompok yang

membedakannya dengan konflik sosial. Konflik politik bukanlah konflik individu karena isu yang dipertentangkan dalam konflik politik adalah isu publik yang menyangkut kepentingan banyak orang, bukan kepentingan satu orang tertentu. Seperti halnya konflik sosial lainnya, konflik politik ditimbulkan oleh adanya keterbatasan sumber daya dan posisi (*resources and positions scarcity*). Semakin tinggi tingkat kelangkaan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup semakin besar kemungkinan terjadinya konflik politik. Dengan kata lain, semakin besar penderitaan dan kekecewaan rakyat semakin besar dorongan di dalam masyarakat untuk terlibat konflik dengan penguasa politik. (sumber; Konsensus dan Konflik Politik (sebuah peninjauan teoritis), Maswadi Rauf)

Partai Politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang telah tersusun dalam partai. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.

Keberadaan partai politik di tengah masyarakat akan mendapat dukungan apabila partai politik tersebut menjalankan fungsi-fungsi partai politik. Partai politik memiliki fungsi dalam sistem politik antara lain: 1) sosialisasi politik, 2) Rekrutmen politik, 3) Partisipasi politik, 4) Pemadu kepentingan, 5) Komunikasi politik, 6) Pengendalian konflik, dan 7) Kontrol politik. Fungsi-fungsi partai politik tersebut sering tidak diindahkan oleh partai politik sehingga citra partai politik di tengah masyarakat menjadi hanya sekedar alat bagi orang-orang yang haus akan kekuasaan. Walaupun itu tidak salah tetapi hendaknya partai politik dapat membangun kedewasan politik rakyat sehingga arah dan kebijakan politik dapat dipahami rakyat. (sumber; Penguasa dan kelompok Elit, Suzanne Keller)

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya

adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusional - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang *political development* sebagai suprastruktur politik.

Ada kalanya di suatu negara, peran partai politik sangat sentral sehingga pembicaraan atau diskusi mengenai partai sangat terasa begitu penting melebihi diskusi tentang negara. Di negara lain, partai politik mendekati tipe ideal sebagai suatu alternatif terbaik untuk menentukan figur pemimpin politik yang mempunyai tanggung jawab terhadap pemilihnya.

Partai politik dengan demikian bertindak sebagai instrumen perwakilan dan sarana untuk menjamin pergantian pemerintahan secara teratur dan tanpa pergolakan yang dapat menghancurkan keseluruhan sendi-sendi masyarakat dan negara yang sudah mapan. Kondisi kepartaian yang demikian banyak didiskusikan oleh para pakar politik.

Namun ada kalanya kebnagkitan dan aktivitas partai seringkali berkaitan dengan proses pembentukan identitas nasional, pembentukan kerangka sistem politik, pengabsahan lembaga pemerintahan, serta usaha-usaha untuk memperkuat persatuan nasional. Dalam kaitan ini seringkali partai politik tidak berfungsi sebagai penyedia akses bagi penyaluran tuntutan yang absah kepada penguasa, tetapi semata-mata sebagai elemen dalam strategi persatuan nasional dan pengontrolan perbedaan pendapat.

Namun saat kita memahami keberadaan partai politik kita tidak bisa mengingkari bahwa partai politik akan selalu memegang peranan penting dalam hal suksesi kepemimpinan yang ada di dalam sistem kekuasaan suatu negara. Dan untuk mencapai tujuan tersebut partai juga melakukan berbagai strategi agar dapat memenangkan kekuasaan yang ada di dalam

suatu negara. penentu keberhasilan partai tersebut adalah sistem keorganisasian yang ada di dalam suatu partai politik tersebut.

Menurut Haryanto, parpol dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum dapat dibagi mejadi dua kategori, yaitu:

1. Partai Massa, dengan ciri utamanya adalah jumlah anggota atau pendukung yang banyak. Meskipun demikian, parta jenis ini memiliki program walaupun program tersebut agak kabur dan terlampau umum. Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung dalam partai tersebut

mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya. Selanjutnya, jika kepentingan kelompok tersebut tidak terakomodasi, kelompok ini akan mendirikan partai sendiri

2. Partai Kader, kebalikan dari partai massa, partai kader mengandalkan kader- kadernya untuk loyal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidakmementingkan jumlah, partai ka der lebih mementingkan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam berorganisasi. Doktrin dan ideologi partai harus tetap terjamin kemurniannya. Bagi anggota yang menyeleweng, akan dipecat keanggotaannya. Sedangkan tipologi berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan, menurut Ichlasul Amal terdapat lima jenis partai politik, yakni:

1. Partai Proto, adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Ciri yang paling menonjol partai ini adalah perbedaan antara kelompok anggota atau "ins" dengan non-anggota "outs". Selebihnya partai ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena itu sesungguhnya partai ini adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokkan ideologi masyarakat

2. Partai Kader, merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto. Keanggotaan partai ini terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai ini

adalah konservatisme ekstrim atau maksimal reformis moderat

3. Partai Massa, muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa berorientasi pada pendukungnya yang luas, misalnya buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya
4. Partai Diktatorial, sebenarnya merupakan sub tipe dari parti massa, tetapi meliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota partai. Rekrutmen anggota partai dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa. (sumber: Konsensus dan Konflik Politik - sebuah peninjauan teoritis, Maswadi Rauf)

Adapun fungsi partai politik, menurut Sigmund Neumann (1981), ada 4 (empat) yaitu agregasi, edukasi, artikulasi dan rekrutmen. Pertama, fungsi agregasi. Partai menggabungkan dan mengarahkan kehendak umum masyarakat yang kacau. Sering kali masyarakat merasakan dampak negatif suatu kebijakan pemerintah, misalnya kenaikan BBM di Indonesia 1 Oktober 2005 lalu yang demikian tinggi. Namun ketidakpuasan mereka kadang diungkapkan dengan berbagai ekspresi yang tidak jelas dan bersifat sporadis. Maka partai mengagregasikan berbagai reaksi dan pendapat masyarakat itu menjadi suatu kehendak umum yang terfokus dan terumuskan dengan baik.

Kedua, fungsi edukasi. Partai mendidik masyarakat agar memahami politik dan mempunyai kesadaran politik berdasarkan ideologi partai. Tujuannya adalah mengikutsertakan masyarakat dalam politik sedemikian sehingga partai mendapat dukungan masyarakat. Cara yang ditempuh misalnya dengan memberi penerangan atau agitasi menyangkut kebijakan negara serta menjelaskan arah mana yang diinginkan partai agar masyarakat turut terlibat perjuangan politik partai.

Ketiga, fungsi artikulasi. Partai

merumuskan dan menyuarakan (mengartikulasikan) berbagai kepentingan masyarakat menjadi suatu usulan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan suatu kebijakan umum (public policy). Fungsi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kader suatu partai, karena fungsi ini mengharuskan partai terjun ke masyarakat dalam segala tingkatan dan lapisan. Bila fungsi ini dilakukan ditambah dengan fungsi edukasi, ia akan menjadi komunikasi dan sosialisasi politik yang sangat efektif dari partai yang selanjutnya akan menjadi lem perekat antara partai dan massa.

Keempat, fungsi rekrutmen. Ini berarti partai melakukan upaya rekrutmen, baik rekrutmen politik dalam arti mendudukan kader partai ke dalam parlemen yang menjalankan peran legislasi dan koreksi maupun ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan, maupun rekrutmen partai dalam arti menarik individu masyarakat untuk menjadi kader baru ke dalam partai. Rekrutmen politik dilakukan dengan jalan mengikuti pemilihan umum dalam segala tahapannya hingga proses pembentukan kekuasaan. Karenanya, fungsi ini sering disebut juga fungsi representasi. (sumber: Konsensus dan Konflik Politik - sebuah peninjauan teoritis, Maswadi Rauf)

Dalam hal tipologi, partai politik sebenarnya memiliki banyak tipologi. Diantaranya yaitu tipologi dalam otoriter dan demokrasi; integratif dan representatif; ideologis dan pragmatis; agamis dan sekuler; demokratis dan revolusioner; massa dan elit; serta demokrasi dan oligarki. Untuk tipologi sistem kepartaian, klasifikasi yang paling umum digunakan adalah berdasarkan pada jumlah kuantitas partai, sedangkan yang lain meliputi sifat tertutup atau kompetitif, agregatif dan ideologis, dll. Suatu tipologi parpol dan sistem kepartaian (sebaiknya) didasarkan pada:

- a. Sumber-sumber dukungan parpol
- b. Organisasi internal
- c. Cara-cara bertindak dan fungsi

Sistem kepartaian bersifat integratif jika partai yang ada bersifat sekretarian dalam menekankan simbol-simbol politiknya. Sistem partai bersifat kompetitif jika partai tersebut komprehensif, di mana organisasi parpol terbuka adanya spesialisasi dalam fungsinya. Sistem kepartaian integratif

cenderung menjadi partai tunggal, sedangkan sistem kepartaian kompetitif cenderung untuk mempunyai sedikitnya dua atau lebih partai.

Dalam hal hubungan partai, pernah dilakukan sebuah penelitian di India dimana dilakukan pembuktian terhadap tiga macam hubungan yaitu hubungan kepentingan (interest linkage), hubungan normatif (normative linkage), dan hubungan operasional (operational linkage).

Hubungan kepentingan menunjukkan bagaimana struktur-struktur dalam masyarakat mengartikulasikan kepentingan utamanya dan parpol dalam hal memperoleh dukungan, merumuskan program-program yang memenuhi tuntutan dari struktur tersebut. Dengan demikian partai menjalankan fungsi (1) Partai menyatakan tuntutan dari berbagai struktur sehingga menjadi sebuah program umum, (2) Partai merangkul semua warga negara ke dalam sistem politik dengan meminta mereka memberikan dukungan pada program partai.

Dalam perspektif hubungan normatif berperan sebagai mata-rantai baik di dalam maupun diantara sistem-sistem. Pada tingkat sistem politik itu sendiri tujuan kemakmuran bersama ditetapkan oleh elit penguasa, media massa, dan eksponen-eksponen program kepartaian. Banyak bukti sejarah di setiap masyarakat demokratis yang menunjukkan rendahnya kontribusi organisasi kepartaian terhadap hubungan normatif. Sedangkan dalam perspektif hubungan operasional menunjukkan keanekaragaman motivasi dan cara-cara pencapaiannya di kalangan orang-orang yang secara akurat terlibat dalam pola hubungan. (sumber: Konsensus dan Konflik Politik - sebuah peninjauan teoritis, Maswadi Rauf).

Menurut Geoffrey C Layman, Konflik bisa terjadi dalam ruang lingkup budaya dan agama dalam Partai Politik. Pada realitanya suatu pemilihan umum di suatu Negara tidak luput dari peran agama, entah itu agama sebagai dasar dari suatu partai atau bahkan suatu partai lain yang berkoalisi dengan partai politik yang berlandaskan islam. Di Indonesia sendiri merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, situasi seperti ini menjadikan partai politik berlomba-lomba untuk mendapatkan masa ataupun simpatik dari rakyat, salah satu cara yang diambil adalah

dengan mendirikan partai politik yang berlandaskan Islam. Fenomena inilah yang menjadikan begitu banyaknya partai berlandaskan Islam di Indonesia saat ini, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah salah satunya. Partai berlandaskan Islam ini didirikan atas dasar sebagai wadah berpolitik para warga Nahdliyin (sebutan bagi warga NU)

Geoffrey C Layman juga menyebutkan dalam bukunya *THE GREAT DIVIDE*, bahwa konsep dari pada Agama sendiri adalah afiliasi terhadap tempat peribadatan masing masing agama, seperti Islam terfokus pada Masjid dan hubungan antara manusia dengan sang pencipta (Allah) serta keyakinan kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah dimana aspek Konflik Politik yang berbasis Agama, hal inilah yang perlu dicari dan diteliti mengapa peran Agama itu sangat besar dalam suatu partai politik. Para ilmuwan politik dan sejarawan meneliti basis agama dalam partai politik dan dalam perkembangan partai politik.

Konflik bisa terjadi dalam ruang lingkup budaya dan agama dalam Partai Politik, perang budaya berlandaskan agama yang terjadi dalam sebuah partai politik tidak hanya terjadi dalam satu dinasti keluarga dalam partai politik tetapi juga bisa terjadi tetapi juga bisa terjadi pada antar individu yang memiliki perbedaan tingkat keyakinan agama dan moral.

Secara tradisional, basis agama dari partisan politik sangat menekankan afiliasi keagamaan. Dari perspektif ini, faktor politis agama merupakan hal paling penting akibat hubungan denominasi agama kekeluargaan dan tradisi organisasi berlandaskan agama yang mengalami perbedaan pandangan dalam hal politik, sedangkan keyakinan dan praktik keagamaan mungkin telah menjadi lebih politis penting, menciptakan budaya, ideologi, dan partisan perpecahan dalam tradisi iman, ada bukti yang cukup bahwa afiliasi dengan tradisi yang masih penting secara politis. (Geoffrey C Layman, *The Great Divide* – chapter 1 page 34)

Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa perilaku keagamaan memiliki dampak langsung pada orientasi politik, dengan individu yang lebih religius menjadi lebih mungkin dibandingkan rekan-rekan mereka yang kurang religius untuk mengambil konservatif sikap pada masalah politik, terutama budaya.

Partisipasi politik menunjukkan bahwa keterlibatan agama merupakan sumber penting dari kegiatan politik, memberikan keterampilan penting dan sumber daya organisasi untuk politik mobilisasi.

Suatu kelompok didefinisikan sebagai sifat golongan yang memiliki keyakinan dan perilaku tersendiri, tetapi tidak menghalangi aspek milik agama dari bermain peran dalam membentuk orientasi budaya dan politik. Pertama, adalah dalam kelompok-kelompok sosial yang keyakinan agama dan menjadi pegangan hidup. Kedua, keanggotaan kelompok agama dapat memainkan peran penting dalam menghubungkan keyakinan agama dengan sikap dan perilaku politik.

Para pemimpin agama seperti Kyai atau Ulama juga memainkan bagian paling penting dalam sebuah partai keyakinan keagamaan seperti untuk terlibat dalam proses politik dan proses pengambilan keputusan.

Bagi sebagian orang, keanggotaan keagamaan / kelompok keagamaan adalah sumber utama dari persahabatan kelompok politik dan interaksi sosial, melalui interaksi ini dan mengakibatkan persepsi kepentingan bersama, agama serta keyakinan politik dan sosial dibentuk dan mempererat satu sama lain. (Geoffrey C Layman, *The Great Divide* – chapter 1 page 59)

## PEMBAHASAN

Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai berlandaskan Islam didirikan pada tanggal 23 Juli 1998 oleh tokoh tokoh besar NU yaitu K.H. Abdurrahman Wahid, K.H. Mustofa Bisri dan K.H. Abdul Muqid Muzadi. Partai yang diusung oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) ini, awal pembentukan PKB merupakan satu-satunya partai yang dibentuk dan bertujuan untuk menampung segala aspirasi warga Nahdliyin (sebutan bagi warga NU).

Sejalan dengan budaya di NU, kyai menduduki posisi dan peran yang sangat penting di PKB, secara struktural kyai ditempatkan pada posisi Dewan Syuro, lembaga perumus kebijakan tertinggi partai sekaligus pemegang otoritas moral untuk mengawasi pergerakan partai dalam upaya menggapai cita-cita politiknya. Dalam perjalanan politik selanjutnya, konflik demi konflik menerpa PKB

sampai saat ini ada tiga konflik yang terjadi ; pertama, Mathori Abdul Djali, kedua Alwi Shihab dan ketiga Muhaimin Iskandar. Setiap konflik berdampak pada keberadaan kyai, baik yang ada dalam struktur maupun di luar struktur partai, begitu pula kepada daerah (tingkat 1 dan 2).

Konflik politik di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhir-akhir ini tidak semata merepresentasikan konflik kepentingan politik di tubuh partai politik yang secara resmi diklaim berbasis massa Nahdlatul Ulama (NU) ini, konflik tersebut sekaligus mengindikasikan kegagalan NU sebagai organisasi sosial keagamaan, NU tidak hanya menjadi korban, ataupun dikorbankan, demi ambisi politik tokoh-tokohnya sendiri.

Sebagaimana kekhawatiran sebagian tokoh NU sejak awal, keberadaan partai politik berbasis NU bukannya menjadi pendorong dinamika peran NU sebagai organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan sosial dan keagamaan, apalagi sebagai wahana meningkatkan prakarsanya untuk menyejahterakan umat Nahdliyyin (sebutan untuk warga NU) melainkan sebaliknya.

Konflik PKB yang sangat berpengaruh terhadap tatanan struktur PKB sendiri adalah konflik antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar. Keputusan dewan syuro PKB untuk memberhentikan ketua Umum Dewan Tanfidz muhaimin Iskandar dianggap tidak bijaksana dan sepihak. Bahkan sikap otoriter Gus Dur sebagai ketua Dewan Syuro dianggap menjadi penyebab konflik internal PKB menjadi berkepanjangan.

Konflik politik antar Elite PKB ini semakin mencuat ke permukaan, tentunya menyebabkan dampak yang sangat berpengaruh bagi daerah-daerah. Karena adanya perpecahan masyarakat yang berada dibawah menjadi terpecah belah. Khususnya di Kota Kediri, mereka bingung menentukan pilihan karena kedua kubu ( kubu Gus Dur dan muhaimin Iskandar ) sama sama memiliki massa yang kuat, perpecahan ini berimbas kepada DPC di Indonesia, dikota Kediri sendiri, terjadi pembekuan terhadap pengurus DPC Kota Kediri oleh kubu Gus Dur yang pada waktu itu sangat mendominasi karena melihat Gus Dur adalah salah satu pendiri PKB dan sebagai Ketua Umum Dewan Syuro, maka wilayah wilayah ataupun cabang cabang yang tidak mengikuti kubu Gus Dur dilakukan pembekuan

kepengurusan, dan segera dibentuk dewan sementara untuk memilih pengurus baru selambat lambatnya 3 bulan.

Fenomena lain yang terjadi sampai saat ini di kota Kediri adalah terbentuknya beberapa kelompok Nahdliyyin yang notebene dari awal adalah anggota PKB menjadi beberapa kelompok / partai, yaitu PKB Muhaimin Iskandar, PKNU Alwi Shihab, dan PKBI Yenni Wahid, yang mana anggotanya adalah para Nahdliyyin yang pecah pada saat mencuatnya konflik Alwi Shihab- Gus Dur , Muhaimin Iskandar - Gus Dur. Partaipun sudah beralih fungsi, anggota tidak lagi fokus pada cita cita pembentukan partai (PKB) yaitu sebagai wadah aspirasi para Nahdliyyin yang semula PKB di bentuk dengan persetujuan musyawarah bersama sebagai partai NU yang menjadi wadah bersatunya aspirasi dan partisipasi warga Nahdliyyin.

Selain itu terjadi pergeseran pencitraan PKB di Kota Kediri, semula merupakan partai besar yang cukup berpengaruh di perpolitikan Indonesia dan satu satunya wadah politik bagi para Nahdliyyin. Dampak lain yang ditimbulkan adalah semakin kecilnya peluang PKB untuk meraih posisi Kepala Daerah di beberapa daerah di Indonesia, termasuk kota Kediri. Ditengah perseteruan panjang yang terjadi, DPC PKB Kota Kediri versi Muhaimin Iskandar, meminta para kadernya memilih PKB, yang disahkan oleh KPU Pusat , pada Pemilu legislatif 9 April 2009, yakni PKB pimpinan Muhaimin Iskandar.

Konflik yang sempat terjadi di tubuh PKB, cukup membuat masyarakat dan kader PKB kebingungan, untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilu legislatif, DPC PKB Kota Kediri versi Muhaimin Iskandar, meminta para kadernya bersikap cermat. Mereka harus memilih PKB yang sudah terdaftar di KPU Pusat, dan secara hukum sah. Namun PKB versi Gus Dur tidak dapat diremehkan keberadaannya karena dari sejarahpun semua tau kalau Gus Dur adasalah salah satu pendiri partai dan sebagai dewan Syuro di tubuh PKB.

Konflik di tubuh PKB benar-benar menjadi permasalahan Nasional nasib NU hanya mampu menjadi alat politik bagi segelintir orang yang sebenarnya sama sekali sudah kehilangan semangat ke-NU-annya. Siapa pun yang berebut kursi pimpinan atau pengurus NU, pantas

diragukan bahwa mereka memang peduli dengan nasib NU dan jamaahnya, mereka bahkan lebih pantas dicurigai sebagai segelintir oportunist yang memimpikan jabatan politik dengan memanfaatkan status syuriah, tanfidziyah atau bahkan sekedar segelintir orang yang berusaha melegitimasi statusnya sebagai tokoh NU. (sumber, [www.pkb.or.id](http://www.pkb.or.id), 11 juli 2012 pukul 22.00)

Sebagai bukti, suara politik internal NU tidak pernah solid, bukan hanya internal kepengurusan partai politik (PKB), melainkan juga internal NU sendiri. Pencalonan gubernur dan bupati di berbagai daerah, terutama yang berbasis NU memperlihatkan bahwa mereka yang dikenal sebagai tokoh-tokoh NU sebenarnya sama sekali bukan orang yang peduli pada NU bahkan PKB sendiri, mereka lebih merepresentasikan dirinya sebagai tokoh-tokoh yang sangat potensial memanfaatkan atau memang sengaja menyediakan diri untuk dimanfaatkan siapa pun demi sebuah jabatan politik. (sumber, [www.pkb.or.id](http://www.pkb.or.id), 11 juli 2012 pukul 22.00)

Konflik politik antar Elite PKB ini semakin mencuat ke permukaan, tentunya menyebabkan dampak yang sangat berpengaruh bagi daerah-daerah, karena adanya perpecahan masyarakat yang berada dibawah menjadi terpecah belah. Khususnya di Kota Kediri, mereka bingung menentukan pilihan karena kedua kubu (kubu Gus Dur dan muhaimin Iskandar) sama-sama memiliki massa yang kuat, perpecahan ini berimbas kepada DPC Kota Kediri terjadi pembekuan terhadap pengurus DPC Kota Kediri oleh kubu Gus Dur yang pada waktu itu sangat mendominasi karena melihat Gus Dur adalah salah satu pendiri PKB dan sebagai Ketua Umum Dewan Syuro, maka wilayah-wilayah ataupun cabang-cabang yang tidak mengikuti kubu Gus Dur dilakukan pembekuan kepengurusan, dan segera dibentuk dewan sementara untuk memilih pengurus baru selambat-lambatnya 3 bulan.

Fenomena lain yang terjadi sampai saat ini di kota Kediri adalah terbentuknya beberapa kelompok Nahdliyyin yang dari awal adalah anggota PKB menjadi beberapa kelompok partai, yaitu PKB Muhaimin Iskandar, PKNU Alwi Shihab, dan PKB versi Gus Dur yang mana anggotanya adalah para Nahdliyyin yang pecah pada saat mencuatnya konflik Alwi Shihab-Gus

Dur, Muhaimin Iskandar - Gus Dur. Partai sudah beralih fungsi dan peran anggota tidak lagi fokus pada cita-cita pembentukan partai (PKB) yaitu sebagai wadah aspirasi para Nahdliyyin, melainkan sebagai alat kelompok-kelompok kepentingan dalam melancarkan kepentingan pribadi sebagai sarana mewujudkan keinginan berpolitik di dalam partai.

Selain itu terjadi pergeseran pencitraan PKB di Kota Kediri, semula merupakan partai besar yang cukup berpengaruh di perpolitikan Indonesia dan satu satunya wadah politik bagi para Nahdliyyin. Dari partai yang semula dikagumi dan banyak dianut karena merupakan partai Islam yang menerapkan demokrasi di lingkup kehidupan partai, serta partai Islam yang tidak memandang latar belakang individu maupun kelompok, dan sangat berpaham idealis demokratis semua orang mempunyai hak dan kewajiban, meskipun dari figur partai yaitu K.H Abdurrahman Wahid terkenal sebagai sosok orang yang sangat berani dan berbicara apa adanya, meskipun banyak yang mencera karena tidak terlalu menerapkan kode etik berbicara yang baik (ceplasp-ceplos).

Dampak lain yang ditimbulkan adalah semakin kecilnya peluang PKB untuk meraih posisi Kepala Daerah di beberapa daerah di Indonesia, termasuk kota Kediri. Karena basis massa, anggota, kader, maupun simpatisan menjadi terbagi antara kubu Gus Dur dan muhaimin. Meskipun sudah di sah kan secara hukum bahwa yang berhak menyandang nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah kubu Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum, masih saja banyak pihak-pihak golongan-golongan yang tidak dapat menerima dikarenakan Gus Dur lah salah satu orang yang mendirikan partai tersebut. Namun hasil akhirnya tetaplah yang menentukan ke eksistensian PKB di pegang oleh siapa, hal inilah yang membuat Muhaimin Iskandar di anggap sebagai penghianat karena telah menyalahi Gus Dur yang notabene selain salah satu pendiri PKB sebagai ketua dewan Syuro juga karena Gus Dur adalah paman dari Muhaimin Iskandar.

## KESIMPULAN

Konflik PKB yang sangat berpengaruh terhadap tatanan struktur PKB sendiri adalah konflik antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar. Keputusan dewan syuro PKB untuk memberhentikan ketua Umum Dewan Tanfidz

muhaimin Iskandar dianggap tidak bijaksana dan sepihak. Bahkan sikap otoriter Gus Dur sebagai ketua Dewan Syuro dianggap menjadi penyebab konflik internal PKB menjadi berkepanjangan.

Perjalanan politik selanjutnya, konflik demi konflik menerpa PKB sampai saat ini ada tiga konflik yang terjadi ; pertama, Mathori Abdul Djalil, kedua Alwi Shihab dan ketiga Muhaimin Iskandar. Setiap konflik berdampak pada keberadaan kyai, baik yang ada dalam struktur maupun di luar struktur partai, begitu pula kepada daerah (tingkat 1 dan 2).

Perpecahan DI DPP PKB berdampak kepada DPC Kota Kediri, terjadi pembekuan terhadap pengurus DPC Kota Kediri oleh kubu Gus Dur yang pada waktu itu sangat mendominasi karena melihat Gus Dur adalah salah satu pendiri PKB dan sebagai Ketua Umum Dewan Syuro, maka wilayah wilayah ataupun cabang cabang yang tidak mengikuti kubu Gus Dur dilakukan pembekuan kepengurusan, dan segera dibentuk dewan sementara untuk memilih pengurus baru selambat lambatnya 3 bulan.

Fenomena lain yang terjadi sampai saat ini di kota Kediri adalah terbentuknya beberapa kelompok Nahdliyyin yang dari awal adalah anggota PKB menjadi beberapa kelompok partai, yaitu PKB Muhaimin Iskandar, PKNU Alwi Shihab, dan PKB versi Gus Dur yang mana anggotanya adalah para Nahdliyyin yang pecah pada saat mencuatnya konflik Alwi Shihab- Gus Dur, Muhaimin Iskandar - Gus Dur. Partai sudah beralih fungsi dan peran anggota tidak lagi fokus pada cita cita pembentukan partai (PKB) yaitu sebagai wadah aspirasi para Nahdliyyin, melainkan sebagai alat kelompok-kelompok kepentingan dalam melancarkan kepentingan pribadi sebagai sarana mewujudkan keinginan berpolitik di dalam partai.

Terjadi pergeseran pencitraan PKB di Kota Kediri, semula merupakan partai besar yang cukup berpengaruh di perpolitikan Indonesia dan satu satunya wadah politik bagi para Nahdliyyin. Dari partai yang semula dikagumi dan banyak dianut karena merupakan partai Islam yang menerapkan demokrasi di lingkup kehidupan partai, serta partai islam yang tidak memandang latar belakang individu maupun kelompok, dan sangat berpaham idealis

demokratis semua orang mempunyai hak dan kewajiban, meskipun dari figur partai yaitu K.H Abdurrahman Wahid terkenal sebagai sosok orang yang sangat berani dan berbicara apa adanya, meskipun banyak yang mencerca karena tidak terlalu menerapkan kode etik berbicara yang baik.

Dampak lain yang ditimbulkan adalah semakin kecilnya peluang PKB untuk meraih posisi Kepala Daerah di beberapa daerah di Indonesia, termasuk kota Kediri. Karena basis massa, anggota, kader, maupun simpatisan menjadi terbagi antara kubu Gus Dur dan muhaimin. Meskipun sudah di sah kan secara hukum bahwa yang berhak menyandang nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah kubu Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum, masih saja banyak pihak- pihak golongan-golongan yang tidak dapat menerima dikarenakan Gus Dur lah salah satu orang yang mendirikan partai tersebut. Namun hasil akhir tetaplah yang menentukan ke eksistensian PKB di pegang oleh siapa, hal inilah yang membuat Muhaimin Iskandar di anggap sebagai penghianat karena telah menyalahi Gus Dur yang notabene selain salah satu pendiri PKB sebagai ketua dewan Syuro juga karena Gus Dur adalah paman dari Muhaimin Iskandar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi, *PKB Jendela Politik Gus Dur*, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1999.
- Budiardjo, Miriam. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Doverger, Maurice, *Partai partai Politik dan kelompok kelompok penekan : suatu pengantar komparatif*, Jakarta, Bina Aksara, 1981.
- J.A, Danny, *Manuver Elit, Konflik dan Konservatisme Politik*, Jakarta, LKiS Pelangi Angkasa, 2006.
- Keller, Suzanne, *Penguasa Dan Kelompok Elit - Peranan elit penentu dalam masyarakat moder*, Jakarta, CV.Rajawali, 1984
- Layman, Geoffrey C, *The Great Divide*, New York, Columbia University Press, 2001
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan*

- Fundamentalisme dalam politik Islam*, Jakarta, Paramadina, 1999.
- Michels, Robert, *Partai Politik : Kecenderungan Oligarkis dalam borokrasi*, Jakarta, Rajawali, 1984.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Rauf, Maswadi, *Konsensus dan konflik politik : sebuah penjajagan teoritis*, Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2001.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

#### **INTERNET**

- [www.dpp-pkb.or.id](http://www.dpp-pkb.or.id) – ad/art senin 5 november 2012 pukul 23.30)
- [www.dpp-pkb.org](http://www.dpp-pkb.org) 23 oktober 2012 pukul 14.50 [www.kompas.com](http://www.kompas.com) selasa, 12 agustus 2010
- [www.detik.com](http://www.detik.com) – pembekuan oleh kubu Gus Dur, 25 oktober pukul 22.15
- Jawa Pos, Kamis 3 April 2011
- Koran Tempo, jum'at, 4 April 2011